

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KERJA SAMA TEKNIS

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT	NOMOR SOP	SDM-131-OT.02.02 TAHUN 2024	
	TANGGAL PEMBUATAN	20 MEI 2024	
	TANGGAL REVISI		
	TANGGAL EFEKTIF		
	DISAHKAN OLEH		KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  Ditandatangani secara elektronik oleh : RAZILU NIP. 196511281991031002 PENYUSUNAN KERJA SAMA TEKNIS
NAMA SOP			
KUALIFIKASI PELAKSANA :			
DASAR HUKUM :			
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Memahami Peraturan tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 2. Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :		
1. SOP ...	1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Jaringan Internet 4. Peraturan Perundang-undangan		
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :		
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik , proses revisi anggaran DIPA di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM akan terhambat dan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tepat waktu.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen		

NOMOR SOP	SDM-131-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	20 MEI 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	20 MEI 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KERJA SAMA TEKNIS

No	Kegiatan	Pelaksanaan								Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM	Pimpinan Unit/ Satuan Kerja Pemrakarsa di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	Ketua Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM	Anggota Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM	Unit/ Satuan Kerja Pemrakarsa di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	Mitra Kerja Sama	Biro Humas, Hukum dan, Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham	Kepala BPSDM Hukum dan HAM	Pimpinan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Mitra Kerja Sama	Kelengkapan	Waktu	
1	Pimpinan Unit/ Satuan Kerja Pemrakarsa di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM mengajukan usulan kebutuhan kerja sama teknis kepada Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM		Mulai							1. Judul Naskah PKS 2. Mitra Kerja Sama 3. Ruang lingkup 4. Jangka Waktu	1 hari	Disposisi, arahan	
2	Menerima usulan kebutuhan dari Pimpinan Unit/ Satuan Kerja Pemrakarsa di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM dan mendisposisikan kepada Ketua Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM									Sumaker	1 hari	Disposisi	
3	Menugaskan Anggota Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM untuk melakukan penyusunan kerja sama teknis									Sumaker	1 hari	Disposisi	
4	Mengkoordinasikan usulan kebutuhan penyusunan kerja sama teknis dengan Unit/ Satuan Kerja Pemrakarsa									Jaringan Internet	1 hari	Informasi	
5	Melakukan perencanaan, peninjakan, dan perumusan naskah perjanjian kerja sama bersama antara Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM dan Unit/ Satuan Kerja Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama									1. Sumaker 2. ATK 3. Komputer 4. Aplikasi Virtual Meeting 5. Internet 6. Ruang Rapat 7. Nota Dinas Undangan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama	7 hari	Konsep Naskah perjanjian kerja sama	
6	Melakukan reviu naskah perjanjian kerja sama oleh Biro Humas, Hukum dan, Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham bersama dengan Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM dan Unit/ Satuan Kerja Pemrakarsa									1. Sumaker 2. ATK 3. Komputer 4. Aplikasi Virtual Meeting 5. Internet 6. Ruang Rapat 7. Surat undangan reviu naskah perjanjian kerja sama	1 hari	Konsep Naskah perjanjian kerja sama	
7	Penyampaian naskah perjanjian kerja sama hasil reviu kepada Mitra Kerja Sama									1. Surat penyampaian naskah PKS hasil reviu 2. Sumaker 3. Internet	1 Hari	Konsep Naskah perjanjian kerja sama	
8	Melakukan finalisasi naskah perjanjian kerja sama dalam negeri antara Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM, Unit/ Satuan Kerja Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama									1. Sumaker 2. ATK 3. Komputer 4. Aplikasi Virtual Meeting 5. Internet 6. Ruang Rapat 7. Surat undangan rapat finalisasi naskah perjanjian kerja sama	1 hari	Konsep Naskah perjanjian kerja sama	
9	Permohonan persetujuan Naskah Perjanjian Kerja Sama									1. Surat penyampaian naskah PKS hasil finalisasi 2. Sumaker 3. Internet	1 hari	Disposisi	
10	Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dan Pimpinan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Mitra Kerja Sama									Selesai	1 Hari	Perjanjian kerja sama	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENAWARAN KERJA SAMA

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT	NOMOR SOP	SDM-132-OT.02.02 TAHUN 2024		
	TANGGAL PEMBUATAN	20 Mei 2024		
	TANGGAL REVISI			
	TANGGAL EFEKTIF			
	DISAHKAN OLEH		KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : RAZILU NIP. 196511281991031002	
NAMA SOP	PENGELOLAAN PENAWARAN KERJA SAMA			
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :			
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham; 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Memahami Peraturan tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 2. Memahami Peraturan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.			
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :			
1. SOP PENYUSUNAN KERJA SAMA TEKNIS	1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Jaringan Internet 4. Peraturan Perundang-undangan			
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, proses revisi anggaran DIPA di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM akan terhambat dan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tepat waktu.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen			

NOMOR SOP	SDM-132-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	20 MEI 2024
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	20 MEI 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENAWARAN KERJA SAMA

No	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPSDM Hukum dan HAM	Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM	Ketua Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM	Anggota Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM	Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dalam Negeri/ Luar Negeri	Biro Humas, Hukum dan, Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham	Pimpinan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Mitra Kerja Sama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dalam Negeri/ Luar Negeri mengajukan surat penawaran kerja sama kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM							Mulai	Proposal Penawaran Kerja Sama	1 hari	Disposisi, arahan	
2	Menerima surat penawaran kerja sama dan mendisposisikan kepada Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM								Sumaker	1 hari	Disposisi	
3	Menugaskan Ketua Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti								Sumaker	1 hari	Disposisi	
4	Mengkoordinasikan penawaran kerja sama kepada Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dalam Negeri/ Luar Negeri pengusul penawaran								Jaringan Internet	1 hari	Informasi	
5	Melakukan pertemuan/ audiensi terkait penawaran kerja sama antara Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM dan Perwakilan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dalam Negeri/ Luar Negeri pengusul penawaran								1. Sumaker 2. ATK 3. Komputer 4. Aplikasi Virtual Meeting 5. Internet 6. Ruang Rapat	1 hari	Informasi Penawaran Kerja Sama, Proposal Penawaran Kerja Sama	
6	Ketua Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM melaporkan hasil audiensi kepada Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM								Sumaker	1 hari	Nota Dinas	
7	Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM meminta arahan terkait laporan hasil audiensi kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM								Sumaker	1 hari	Nota Dinas	
8	Kepala BPSDM Hukum dan HAM memberikan arahan tindak lanjut hasil audiensi								Sumaker	1 hari	Disposisi	
9	Melakukan perencanaan, peninjauan, dan perumusan naskah perjanjian kerja sama bersama antara Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM dan Perwakilan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dalam Negeri/ Luar Negeri pengusul penawaran								1. Sumaker 2. ATK 3. Komputer 4. Aplikasi Virtual Meeting 5. Internet	7 hari	Konsep Naskah perjanjian kerja sama	
10	Melakukan reviu naskah perjanjian kerja sama oleh Biro Humas, Hukum dan, Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham bersama dengan Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM dan Perwakilan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dalam Negeri/ Luar Negeri pengusul penawaran yang menjadi Mitra Kerja Sama								1. Sumaker 2. ATK 3. Komputer 4. Aplikasi Virtual Meeting 5. Internet 6. Ruang Rapat 7. Surat undangan reviu naskah perjanjian kerja sama	1 hari	Konsep Naskah perjanjian kerja sama	
11	Penyampaian naskah perjanjian kerja sama hasil reviu kepada Perwakilan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dalam Negeri/ Luar Negeri yang menjadi Mitra Kerja Sama								1. Surat penyampaian naskah PKS hasil reviu 2. Sumaker 3. Internet	1 Hari	Konsep Naskah perjanjian kerja sama	
12	Melakukan finalisasi naskah perjanjian kerja sama dalam negeri antara Tim Kerja Urusan Kerja Sama BPSDM Hukum dan HAM, Unit/ Satuan Kerja Pemrakarsa dan Perwakilan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dalam Negeri/ Luar Negeri yang menjadi Mitra Kerja Sama								1. Sumaker 2. ATK 3. Komputer 4. Aplikasi Virtual Meeting 5. Internet 6. Ruang Rapat 7. Surat undangan rapat finalisasi naskah perjanjian kerja sama	1 hari	Konsep Naskah perjanjian kerja sama	
13	Permohonan persetujuan Naskah Perjanjian Kerja Sama								1. Surat penyampaian naskah PKS hasil finalisasi 2. Sumaker 3. Internet	1 hari	Disposisi	
14	Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dan Pimpinan Instansi/ Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah Dalam Negeri/ Luar Negeri yang menjadi Mitra Kerja Sama								Selesai	1 Hari	Perjanjian kerja sama	

